

M. Anhari Jamil , ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN MELALUI *ONLINE* YANG TIDAK SESUAI PESANAN BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Pembimbing Adi Suliantoro . S.H, M.H. Program Studi Ilmu Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

## **ABSTRAK**

Permasalahan yang sering muncul dalam jual beli barang secara Online tersebut biasanya berkaitan dengan barang yang diterima konsumen setelah melakukan pembelian. Dimana barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan diskripsi barang yang terdapat dalam Online shop. Berdasarkan Pasal 4 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Permasalahan yang terdapat pada penulisan ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli barang secara Online sesuai Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Upaya apa saja yang dapat dilakukan konsumen dikarenakan barang tidak sesuai pesanan serta Bagaimana upaya Pemerintah dalam mengantisipasi jual beli secara Online terkait barang tidak sesuai pesanan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif, sedangkan spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Data penelitian yang digunakan adalah Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan Data Primer sebagai pelengkap dari data sekunder yang kemudian penulis analisi menggunakan Metode deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh, adalah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya konsumen yang dapat dilakukan yakni dengan permohonan pengembalian, jalur litigasi, dan jalur non litigasi (BPSK), serta upaya pemerintah dalam Mengantisipasi Jual Beli Secara *Online* Terkait Barang Tidak Sesuai Pesanan yaitu dengan Pembinaan Terhadap Konsumen Ketentuannya terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Terhadap Konsumen.

***Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Jual beli Tidak Sesuai Pesanan,***

***Upaya Pemerintah.***

M. Anhari Jamil , ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PEMBELIAN MELALUI *ONLINE* YANG TIDAK SESUAI PESANAN BERDASARKAN UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , Pembimbing Adi Suliantoro . S.H, M.H. Program Studi Ilmu Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

## **ABSTRACT**

*The problems that often arise in buying and selling goods online are usually related to goods received by consumers after making a purchase. Where the goods received by the consumer do not match the description of the goods contained in the online shop. Based on Article 4 letter h of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection states that consumers are entitled to compensation, compensation and/or replacement if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or not properly.*

*The problem contained in this paper is how the form of legal protection for consumers in buying and selling goods online according to Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, what efforts can be made by consumers because the goods are not in accordance with the order and how are the Government's efforts in anticipating buying and selling online related to goods that are not as ordered.*

*This study uses a normative juridical approach, while the specifications in this study are analytical descriptive. The research data used is secondary data obtained through library research and primary data as a complement to secondary data which is then analyzed using deductive method.*

*The results of the research obtained are a form of legal protection for consumers, preventive legal protection and repressive legal protection. Consumer efforts that can be made are by requesting returns, litigation channels, and non-litigation channels (BPSK), as well as government efforts in Anticipating Online Sales and Purchases Related to Non-Ordered Goods, namely by Guiding Consumers. The provisions are contained in Article 29 paragraph (1) of the Law. -Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, and Supervision of Consumers.*

**Keywords : Consumer Protection, Unordered Buying and selling, Government Efforts.**